

# PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

Farah Afrianti<sup>1</sup> , Lina Marlioni<sup>2</sup> , Ahmad Juliarso<sup>3</sup>

Universitas Galuh Ciamis<sup>1,2,3</sup>  
E-mail : farahafrianti2@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh metadata pada Ciamis Sadata yang belum dapat diakses secara keseluruhan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola Ciamis Sadata, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan Ciamis Sadata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan e-government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan jumlah informan sebanyak 8 (delapan) orang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan Teknik analisis data melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian yang berdasarkan pada tiga elemen pengembangan e- government yang terdiri dari Support, Capacity, dan Value menurut Indrajit dalam Nurmandi, dkk (2020:98) menunjukkan bahwa pengembangan e-government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis belum optimal. Dimana dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya, kurangnya koordinasi antara OPD dengan Diskominfo, terbatasnya SDM yang kompeten, serta kurangnya publikasi mengenai Ciamis Sadata. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan dengan para OPD melauai forum atau FGD, diadakannya penyempurnaan validasi agar ada pembaharuan data, dilakukan publikasi secara bertahap, diadakannya pelatihan bagi pegawai, serta memaksimalkan penggunaan infrastruktur seefektif mungkin.*

**Kata Kunci :** *Pengembangan, E-Government, Ciamis Sadata.*

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memaksimalkan proses penerapan SPBE, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan sistem e-government, dimana e- government merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan -pemanfaatan perangkat baik itu komputer, jaringan

komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan terutama pelayanan publik yang dalam pelaksanaannya masih dibawah batas minimal.

Sebagaimana dikatakan oleh Juliarso. A , bahwa : “Penggunaan e- government untuk pelayanan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan

publik secara penuh kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi meliputi penyampaian informasi, program kerja, visi misi, pelayanan publik, hingga hubungan ke setiap Satuan Kerja Pemerintah Kerja (SKPD), termasuk ke pihak eksternal.” (Juliarso. A, 2019 : 21).

Belum banyak kementerian / lembaga maupun pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi dalam proses pelayanan publik. Mengingat bahwa penerapan e-government itu sendiri sejalan dengan revolusi industri 4.0. Sehingga untuk mendukung komitmen tersebut dikuatkan atas munculnya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang isinya menginstruksikan kepada gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut, kabupaten Ciamis menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerapkan e-government pada layanan publik di Dinas Komunikasi & Informatika dimana hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata Pemerintahan Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Meninjau informasi yang tertera pada website Diksominfo Ciamis terdapat total 9 aplikasi/website yang

sudah bekerja dari tahun 2020 dan hingga saat ini dalam tahap pengembangan. Penerapan e-government pada layanan publik diantaranya Satu Data Ciamis, Trust Positif, SP4N Lapori, LPSE, dan Sapawarga. Sedangkan penerapan e-government pada layanan administrasi diantaranya Srikandi, SIKISMIS, E-Office Kabupaten Ciamis, dan E-Office Desa Kabupaten Ciamis.

Dari beberapa website/aplikasi penerapan e-government oleh Diskominfo Ciamis yang menarik perhatian peneliti ialah layanan publik pada Satu Data Ciamis atau Ciamis Sadata. Kaitannya dengan regulasi mengenai Ciamis Sadata, sudah ditetapkan dalam peraturan presiden no.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses antara instansi pusat dan instansi daerah. Sehingga untuk mempermudah perwujudan Ciamis Sadata, pemerintah kabupaten Ciamis mengeluarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Satu Data Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi pada portal website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, pengembangan e-government oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dipandang belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan

temuan peneliti, beberapa fenomena pengembangan e- government pada Ciamis Sadata sebagai bentuk layanan publik berbasis elektronik, terdapat beberapa indikator masalah diantaranya :

1. Metadata pada webiste Ciamis Sadata belum dapat diakses secara keseluruhan. Dimana data yang tersedia dalam website Ciamis Sadata masih terbatas.
2. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola website Ciamis Sadata, Sehingga menyebabkan website Ciamis Sadata mengalami keterlambatan pembaharuan sistem.
3. Masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait layanan publik yang berkaitan dengan pengembangan e- government.

Berdasarkan indikator permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengembangan e- government yang terfokus pada layanan publik Ciamis Sadata dengan judul “PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. E-Government**

Pemerintahan elektronik atau e- government berasal dari bahasa inggris electronic government yang disebut e- gov, digital government, online

Government atau dalam konteks tertentu disebut transformasional Government. Hal yang berkaitan dengan e-government telah diatur dalam instruksi presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa definisi elektronik government sebagai pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Holmes dalam indrajit (2014 : 61) menyebutkan bahwa : “electronic government, or e-government, is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer-oriented, cost- effective, and altogether different and better way”. Definisi tersebut menggambarkan pelayanan yang diberikan pemerintah secara online akan memudahkan warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelayanan yang diberikan secara online juga bermanfaat untuk mengurangi biaya, proses yang berbelit-belit, menambah kecepatan, serta membuat proses lebih fleksibel dan responsif.

Menurut The World Bank Group, e-government adalah “sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara baik”. ( Falih Suedi, Bintoro

Wardianto, 2010:54).

Adapun e-government yang secara luas dapat didefinisikan sebagai “pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis, dan lembaga pemerintah yang lain.” (Nugroho T. W. A, 2016 : 280).

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli mengenai definisi definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh kantor pemerintah melalui sebuah akses jaringan internet terhadap pemberian fasilitas dalam melakukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, bisnis maupun kerjasama antar institusi pemerintah.

Dalam prakteknya e- government menggunakan internet yaitu untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik yang berorientasi pada layanan publik.

## 2. Konsep Electronic Government

Konsep dasarnya e-government merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak – pihak yang lain. Artinya tingkat pemanfaatan dari e-government itu sendiri meliputi pembuatan aplikasi yang sesuai dengan konsep dari pelayanan yang dikemukakan oleh Ilham (2021 : 13-24), diantaranya :

a) Government to Citizens

Pada dasarnya tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e- government bertipe Government to Citizens ini adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal – kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan.

b) Government to Business

Tipe Government to Businesses (G2B) adalah bentuk penyediaan pelayanan informasi yang ditujukan pada pihak bisnis (seperti perusahaan swasta) yang membutuhkan data dan informasi dari pemerintah, serta interaksi antara kalangan bisnis dengan lembaga pemerintahan, juga berkaitan dengan hak dan kewajiban dari kalangan bisnis tersebut sebagai suatu entity (kesatuan) yang berorientasi pada hasil (profit). Ini merupakan salah satu tugas utama dari pemerintahan yaitu memberikan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c) Government to Governments

Government to government (G2G) atau pemerintah ke pemerintah dimaksudkan bahwa adanya komunikasi atau pertukaran informasi yang dilakukan secara online antar departemen atau lembaga pemerintah melalui database yang terintegrasi. Artinya, pertukaran informasi yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut dapat dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antara berbagai cabang dari pemerintahan

yang sama.

d) Government to Employees

Government to employees merupakan aplikasi e-government yang digunakan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang bekerja pada institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Fokus utama G2E ini agar produktivitas dari pemerintah dan para pegawainya dapat menyusun interaksi yang lebih efektif ke depannya.

Pada hakikatnya, instansi yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian sudah mengaplikasikan konsep dari penerapan e-government melalui bentuk pelayanan online yang disajikan dalam aplikasi atau website. Salah satu yang menjadi sorotan bagi peneliti ialah Satu Data Ciamis sebagai layanan tata kelola data pemerintahan berbasis website yang termasuk kedalam konsep government to government G2G dan government to citizens G2C. artinya Satu Data Ciamis dapat menyediakan dan memberikan informasi seputar data pemerintahan kepada masyarakat dan dapat dibagi pakaikan / pertukaran informasi oleh instansi lainnya untuk dijadikan sebagai sumber atau kebutuhan tertentu.

3. Elemen Pengembangan E-Government

Pengembangan electronic government bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan teknologi berbasis elektronik. Sehingga

pada penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Indrajit dalam Nurmandi, dkk (2020:98) atas hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government. terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan. Elemen tersebut diantaranya :

1. Support (dukungan)
2. Capacity (kemampuan)
3. Value (Nilai & Manfaat)

Penelitian yang didasari oleh teori yang ada bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan e-government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Apakah sudah berjalan dengan baik dan sejalan dengan teori tersebut atau tidak.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang terjadi melalui kata-kata dan tindakan. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu menurut Indrajit (Nurmandi. A, dkk 2020:98) yang berdasarkan pada tiga pengembangan e-government yang terdiri dari :

1. Support (dukungan)
2. Capacity (kemampuan)
3. Value (Nilai & Manfaat)

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data

wawancara peneliti dengan informan yang berjumlah 8 orang. Adapun yang dijadikan informan pada penelitian ini terdiri dari 1 (orang) Kepala Dinas, 1 (orang) kepala bidang PSDE, 3 (orang) pegawai bidang PSDE, 1 (orang) Kepala Bidang LITBANG BAPPEDA, dan 2 (orang) masyarakat pengakses Ciamis Sadata.

Sumber data sekunder yaitu data yang berdasarkan pada literatur dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pengembangan e- government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengembangan e-government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis ditinjau berdasarkan 3 (tiga) dimensi pengembangan e-government, yang terdiri dari :

- 1) Support (dukungan)
- 2) Capacity (kemampuan)
- 3) Value (Nilai & Manfaat)

Untuk penjelasan lebih lanjut, diuraikan sebagai berikut :

### **1. Support (dukungan)**

- a. Adanya kelengkapan metadata pada Ciamis Sadata sebagai bentuk disepakatinya kerangka e-government.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kelengkapan metadata pada Ciamis Sadata dinyatakan belum

sepenuhnya maksimal. Hal ini dibuktikan melalui suplay data dari OPD sebagai produsen data terhadap Diskominfo sebagai walidata yang dinilai belum efektif. Selain itu, pengguna Ciamis Sadata juga belum dapat merasakan manfaat dari Ciamis Sadata itu sendiri sebagai penyedia informasi elektronik.

Perlu diketahui bahwa metadata terdiri dari tiga aspek yaitu metadata indikator, metadata variabel, dan metadata kegiatan. Adapun dalam impelementasinya Diskominfo baru memenuhi metadata variabel, belum mencapai metadata indikator, dan metadata kegiatan dimana metadata kegiatan diperoleh dari OPD sebagai produsen data. Sehingga kelengkapan metadata pada Ciamis Sadata belum dapat dikatakan sebagai metadata yang sempurna.

Berkaitan dengan hal tersebut, Diskominfo Kabupaten Ciamis masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya rendahnya koordinasi yang terjalin antara OPD sebagai produsen data dengan Diskominfo sebagai walidata dalam hal mendukung pengembangan e-government, OPD masih dipengaruhi oleh ego sektoral terkait informasi mengenai data. Selain itu, rendahnya pengetahuan OPD menmenegenai pentingnya data dan bagaimana mengimplementasikan metadata.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait kelengkapan metadata ialah dengan terus mendorong para OPD sebagai

produsen data dengan cara memberikan support dan pendekatan baik pendekatan melalui forum atau FGD sehingga dapat betul – betul memahami pentingnya data untuk kemudian dapat diimplementasikan menjadi suatu metadata yang sempurna dalam mendukung pengembangan e-government sesuai dengan harapan, selain itu adanya bantuan dari pemimpin yang lebih tinggi dari Diskominfo untuk nantinya dapat disebarluaskan kepada setiap SKPD/OPD agar memudahkan dalam permintaan data.

Sebagaimana dijelaskan oleh Nurmandi. A, dkk bahwa: “agar pemanfaatan teknologi informasi di setiap instansi pemerintahan dapat membentuk jaringan kerja yang optimal, maka perlu diupayakan adanya standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik serta standarisasi metadata yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah.” (Nurmandi. A. dkk, 2020 : 60).

Dari pandangan tersebut, kelengkapan metadata pada Ciamis Sadata sebagai bentuk pengembangan e-government di kabupaten Ciamis belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nurmandi. A, dkk (2020). perlu diketahui bahwa agar pengembangan e-government melalui Ciamis Sadata dapat maksimal diperlukan kelengkapan metadata yang sesuai standar. Kelengkapan metadata

yang maksimal dan memenuhi standar akan memberikan kebermanfaatn bagi seluruh pengguna baik pemerintah ataupun masyarakat. selain itu juga dapat mendorong pengembangan e-government di kabupaten Ciamis menjadi lebih baik.

b. Adanya perencanaan mengenai estimasi / jangka waktu pengerjaan sistem website Ciamis Sadata.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi dari perencanaan berkaitan dengan estimasi atau jangka waktu penyusunan sistem Ciamis Sadata belum dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih terhambatnya proses suplay data yang menyebabkan tidak sesuainya dengan agenda pengumpulan / cutoff data yang telah ditetapkan. mengingat bahwa perencanaan merupakan poin utama agar segala sesuatu dapat berjalan dengan efektif.

Dalam hal ini Diskominfo Kabupaten Ciamis masih mengalami hambatan – hambatan diantaranya lamanya proses suplay data dan terkadang tidak sesuai dengan agenda cutoff pengumpulan data, Diskominfo juga belum dapat mengolah data per-hari. Selain itu, kurangnya koordinasi antara OPD sebagai produsen data dengan Diskominfo sebagai walidata, beberapa OPD masih terbatas keilmuannya yang dapat dilihat dari belum dapat mengolah data dengan benar sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali dimana hal

tersebut menyebabkan penguluran waktu dan tidak sesuai dengan perencanaan.

Adapun Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan diadakannya penyempurnaan validasi dimana setiap harinya akan selalu ter-update atau selalu ada perubahan. Penyempurnaan tersebut harus dapat terjadwal dengan dilakukan satu tahun 3 kali (bulan ke 4, ke 8, ke 12), dimana hal tersebut dilakukan untuk pembahasan data sektoral dengan mengundang pemegang data dari tiap OPD.

Sebagaimana menurut Indrayani dan Gatningsih (2013 : 12), bahwa : “perencanaan merupakan kunci keberhasilan dan hanya satu – satunya cara untuk mengelola perubahan secara efektif. Perencanaan juga mampu mengendalikan dan mengawasi sumber daya manajemen dan penetapan prioritas. Tingkat operasional merupakan bagian dari perencanaan penggunaan TIK yaitu menangani domain informasi pemerintah yang spesifik, melakukan aktivitas rinci dari proses dan fungsi organisasi pemerintahan, dan terkait dengan program manajemen harian dan berperan dalam skala waktu antara 1 – 3 tahun.”

Sehingga berdasarkan pandangan tersebut, perencanaan mengenai estimasi atau penyusunan Ciamis Sadata belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Indrayani dan Gatningsih (2013). Dalam perencanaan mengenai estimasi

penyusunan Ciamis Sadata belum mampu melakukan aktivitas yang rinci dan belum adanya program manajemen harian.

Perlu diketahui perencanaan yang baik bukan hanya melalui penetapan estimasi waktu atau penyusunan Ciamis Sadata itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana pengimplementasian dari ditetapkannya estimasi tersebut melalui aktivitas yang rinci dan bagaimana menjalankan proses dari fungsi organisasi pemerintahan itu sendiri. Sehingga perencanaan yang baik dapat mempercepat perubahan yang efektif dan mewujudkan harapan yang baik.

c. Adanya pembagian tupoksi dalam proses penyusunan sistem website Ciamis Sadata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pembagian tupoksi dalam penyusunan website Ciamis Sadata. Dimana tupoksi tersebut diturunkan langsung dari kepala dinas kemudian diimplementasikan melalui bidang PSDE dimana tugas bidang PSDE tersebut ialah untuk mengelola portal Ciamis Sadata. semua tugas nya sudah terfokus sesuai tupoksi masing – masing. Adapun dalam implementasinya, pembagian tupoksi tersebut sudah berjalan dengan baik dengan melihat terdapat fungsionalisasi jabatan dan kinerja dari masing masing staf yang sudah terpenuhi.

Uraian diatas sejalan dengan pendapat Indrayani dan Gatningsih (2013 : xvi ) yang mengungkapkan



bahwa : “fungsionalisasi Jabatan sangat berpengaruh besar terhadap kelancaran tugas-tugas administrasi, sebagian satuan organisasi yang fungsi-fungsi jabatan didalamnya terjabar dengan jelas menunjukkan bahwa misi yang diemban oleh satuan kerja dapat tercapai dengan lebih terkoordinasi dan terjadwal.”

Dengan demikian dilakukannya pembagian tupoksi dan fungsionalisasi jabatan ialah guna memperlancar tugas – tugas administrasi, menghindari tugas– tugas yang terbengkalai juga mencapai harapan - harapan organisasi itu sendiri, terutama dalam mewujudkan Ciamis Sadata.

d. Adanya regulasi dalam mendukung penetapan pengembangan Ciamis Sadata.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis atas data dan informasi yang didapat berkaitan dengan regulasi dalam mendukung penetapan dan pengembangan Ciamis Sadata, terdapat regulasi yang mendukung atas pengembangan Ciamis Sadata yaitu dibuatnya Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Satu Data Ciamis.

Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut, pihak Diskominfo langsung bertindak dengan menyusun strategi untuk mengembangkan satu data Ciamis melalui portal website Ciamis Sadata. Adapun dalam implementasinya, Ciamis Sadata sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Uraian di atas juga sejalan

dengan pendapat Nurmandi, A. dkk ( 2020 : 13 ) yang menyatakan bahwa :“transformasi kelembagaan yang dipengaruhi oleh ICT dilihat dari pilar regulatif. Artinya sejauhmana pelaksanaan kebijakan terkait dengan ICT bisa dilaksanakan secara konsisten. Dilihat dari sistem simbol ditandai dengan adanya aturan hukum (rules of law) yang menjadi dasar tindakan bagi semua aparat birokrasi dalam menjalankan perannya. Dalam hal ini apakah organisasi bergerak berdasarkan regulasi yang ada, sehingga seluruh pejabat patuh pada aturan yang ada dalam organisasi, serta regulasi sudah membudaya dalam pelaksanaan tugas.”

Dengan demikian adanya regulasi ialah tidak lain dijadikan sebagai dasar tindakan bagi semua pihak untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten. Sama halnya seperti Ciamis Sadata yang merupakan kebijakan pemerintah untuk dapat diterapkan di kabupaten Ciamis. Agar pelaksanaan kebijakan atau pengembangan Ciamis Sadata dapat berjalan dengan baik maka dibuatnya regulasi Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan statistik sektoral dan satu data Ciamis. Adanya Peraturan Bupati tersebut bukan hanya untuk memperlancar pengembangan dalam hal permintaan data tetapi juga dijadikan sebagai acuan apakah Ciamis Sadata tersebut selaras dengan Peraturan Bupati yang telah dibuat.

e. Dilakukannya sosialisasi mengenai Ciamis Sadata secara

merata baik secara khusus (Birokrat) ataupun secara umum (masyarakat).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi Ciamis Sadata secara merata baik secara khusus (Birokrat) ataupun secara umum (masyarakat) belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut ditandai Ciamis Sadata yang masih dalam proses pengembangan dan penyempurnaan sehingga belum dapat dipublikasikan kepada publik. Sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui informasi berkaitan dengan sosialisasi Ciamis Sadata. pelaksanaan sosialisasi baru dilakukan di lingkup Pemerintah Daerah saja yang mencakup SKPD atau OPD dan belum sampai kepada masyarakat umum. Sosialisasi tersebut dilakukan sebatas untuk memaparkan sejauh mana progres Ciamis Sadata dengan menerima saran dari setiap OPD apabila terdapat ketidaksesuaian pada laman website Ciamis Sadata. Adapun publikasi Ciamis Sadata baru dilakukan pada platform media sosial saja berkaitan dengan pengenalan website Ciamis Sadata.

Dalam hal ini, Diskominfo Kabupaten Ciamis masih mengalami hambatan dalam sosialisasi Ciamis Sadata secara merata baik secara khusus (birokrat) ataupun secara umum (masyarakat), dimana Ciamis Sadata masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat di publikasikan ke publik, meskipun sudah ada yang mengetahui adanya Ciamis Sadata.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan lebih memaksimalkan progres Ciamis Sadata agar segera dapat dipergunakan oleh publik. Adapun Ciamis Sadata baru dilakukan publikasi pada platform media sosial berkaitan dengan pengenalan website Ciamis Sadata. Diskominfo juga sudah mengatur waktu dan tenggat untuk

dapat mempublikasikan Ciamis Sadata kepada publik meskipun Ciamis Sadata belum sepenuhnya maksimal.

Sebagaimana dikatakan oleh Sumaryo, dkk (2009 : 20) bahwa “Diseminasi informasi merupakan upaya penyebarluasan informasi dari sumber kepada khalayak sasaran. Kegiatan diseminasi dapat dilakukan melalui pendekatan massa, kelompok, maupun perorangan.”

Berdasarkan pandangan tersebut, pelaksanaan sosialisasi Ciamis Sadata secara khusus kepada birokrat dan secara umum kepada masyarakat belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sumaryo, dkk (2009 : 20), bahwa sosialisasi Ciamis Sadata belum dapat disebarkan secara intens kepada publik. perlu diketahui bahwa Pelaksanaan sosialisasi yang maksimal dapat dilakukan dengan diseminasi informasi melalui pendekatan massa, kelompok, ataupun perorangan.

f. Dilakukannya sosialisai secara berkelanjutan berkaitan dengan pembaharuan sistem.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sosialisasi Ciamis Sadata berkaitan dengan pembaharuan sistem

belum dilakukan dengan maksimal, hal tersebut dibuktikan atas adanya pelaksanaan sosialisasi yang masih dilakukan di lingkup Diskominfo saja, adapun sosialisasi dapat dilakukan hanya pada agenda tertentu saja dengan dihadiri oleh sekretaris daerah dan perwakilan dari SKPD dan OPD tertentu, sehingga pelaksanaan sosialisasi belum dapat dikatakan sosialisasi berkelanjutan. Selain itu, setiap OPD masih rendah dalam memberikan informasi terkait masukan atau saran untuk Ciamis Sadata.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan berkaitan dengan pembaharuan sistem ialah bahwa Ciamis Sadata masih dalam tahap pembangunan metadata. Selain itu, OPD juga belum bisa memberikan informasi terkait masukan untuk portal Ciamis Sadata.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan menjalin kerjasama dan memaksimalkan koordinasi yang baik dengan SKPD/OPD untuk nantinya dapat memberikan masukan apakah sudah cukup bagi Ciamis Sadata untuk dapat memberikan informasi. Sebagaimana dikatakan oleh Sutaryo (2020 : 59) bahwa sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Berdasarkan pandangan tersebut, pelaksanaan sosialisasi Ciamis Sadata

secara berkelanjutan berkaitan dengan pembaharuan sistem belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sutaryo (2020). Dalam implementasinya OPD belum mampu untuk memberikan feedback atau informasi terkait masukan dan saran agar Ciamis Sadata selalu melakukan perubahan. Perlu diketahui bahwa tanggapan dan masukan sangat penting untuk dapat memberikan motivasi bagi sistem itu sendiri untuk dapat selalu melakukan perubahan sesuai harapan bersama.

g. Dilakukannya sosialisasi mengenai Ciamis Sadata secara konsisten mengenai metadata yang dimuat dalam sistem.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi Ciamis Sadata belum dilaksanakan dengan maksimal dan menyeluruh. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pelaksanaan sosialisasi mengenai metadata yang hanya dilakukan pada tingkat pemda saja tanpa mempublikasikan perubahan atau pembaharuan metadata melalui platform atau media sosial, sehingga publik tidak mengetahui secara langsung perubahan apa saja yang dilakukan pada Ciamis Sadata. Selain itu, implementasi perubahan dari saran – saran berkaitan dengan Ciamis Sadata membutuhkan jangka waktu lama yang menyebabkan lambatnya fiksasi Caimis Sadata. Adapun hambatan dalam konsistensi pelaksanaan sosialisasi Ciamis Sadata

berkaitan dengan metadata yang dimuat dalam sistem ialah terdapat jangka waktu yang lama dalam pembaharuan atau perubahan Ciamis Sadata setelah dilaksanakannya sosialisasi tersebut. Selain itu, kurangnya publikasi berkaitan dengan perubahan dari Ciamis Sadata sehingga publik belum dapat mengetahui secara langsung mengenai perubahan apa saja yang ada pada Ciamis Sadata.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah

dengan memanfaatkan waktu dan memaksimalkan kontribusi dari SDM itu sendiri dengan menjalankan tugas sesuai agenda yang telah ditetapkan untuk dapat melakukan perubahan Ciamis Sadata dengan tepat waktu. Selain itu, diperlukan adanya publikasi melalui media sosial berkaitan dengan perubahan apa saja yang sudah dilakukan pada Ciamis Sadata, sehingga memudahkan publik untuk mengetahui hal baru mengenai Ciamis Sadata itu sendiri.

Sebagaimana dikatakan oleh Deminson dalam Tika (2006:136), bahwa “konsistensi menyangkut keyakinan, nilai – nilai, symbol, dan peraturan yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan khususnya yang menyangkut metode melakukan bisnis, perilaku pegawai dan tindakan tindakahn bisnis lainnya.”

Berdasarkan pandangan tersebut, konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi Ciamis Sadata berkaitan dengan metadata yang dimuat dalam sistem belum sesuai dengan apa yang

dikatakan oleh Deminson dalam Tika (2006:136). Konsistensi dalam sosialisasi diperlukan untuk melihat kinerja sejauh mana pembaharuan dari perubahan sistem itu sendiri. Sehingga mempercepat Ciamis Sadata untuk dapat dipergunakan dan memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak.

## **2. Cappacity (kemampuan)**

a. Adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan Ciamis Sadata

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keterdiaan SDM yang kompeten masih kurang dan belum terpenuhi dengan maksimal. Hal ini dibuktikan melalui keterbatasan pengetahuan, selain itu rendahnya pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM itu sendiri.

Dalam hal ini, Diskominfo Kabupaten Ciamis mengalami hambatan dalam ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten ialah rendahnya pelaksanaan sosialisasi atau pelatihan terhadap SDM, sehingga menyebabkan SDM memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan baik dalam hal statistik, metadata, atau pengolahan data.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan dilaksanakannya pelatihan – pelatihan sesuai bidangnya bagi para SDM seperti melalui rapat mingguan dan mendatangkan pemateri ahli, selain itu DISKOMINFO Kab. Ciamis juga

melakukan perjalanan dinas seperti kunjungan ke instansi lain untuk memperdalam pengetahuan para pegawai dalam rangka meningkatkan kapasitas atau value sehingga pengembangan Ciamis Sadata atau bentuk pengembangan e- government lainnya dapat berjalan sesuai rencana.

Sebagaimana dikatakan oleh Gouillart dan Nelly dalam Nurmandi. A, dkk. (2020 : 28) menyatakan bahwa “SDM berperan sebagai motor penggerak organisasi, artinya SDM harus mau melalui proses pembelajaran dalam berorganisasi yang dikenal dengan istilah renewal atau proses membekali SDM dengan keterampilan (skills) dan semangat (spirit) yang baru.”

Berdasarkan pandangan tersebut, dalam hal peningkatan SDM, diskominfo belum mampu melaksanakan staretgi renewal tersebut seperti yang dikatakan oleh Gouillart dan Nelly dalam Nurmandi. A, dkk. (2020 : 28)). Adapun, dalam rangka peningkatan kapasitas, setiap SDM hanya dapat mengikuti program tertentu yang penyelenggaraannya bersifat individu, tidak diadakan oleh Diskominfo. Perlu diketahui bahwa adanya strategi renawal berguna untuk menguatkan SDM dengan meningkatkan kapasitas dari SDM itu sendiri, sehingga dengan SDM yang kompeten akan lebih siap dalam menjalankan tugas atau segala bentuk pengembangan e- government.

b. Adanya ketersediaan infrastruktur teknologi yang

memadai dalam menunjang pengembangan Ciamis Sadata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketersediaan teknologi dalam menunjang pengembangan Ciamis Sadata belum maksimal, hal tersebut ditandai dengan beberapa pegawai masih menggunakan fasilitas milik pribadi sehingga beberapa pekerjaan menjadi terhambat dan belum dapat menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari.

Adapun hambatan dalam ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dalam menunjang pengembangan Ciamis Sadata adalah bahwa DISKOMINFO belum memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi infrastruktur sehingga setiap pegawai belum dapat menyelesaikan pekerjaan satu hari selesai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan mempergunakan anggaran sesuai kebutuhan dan memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang ada pada jam kerja.

Sebagaimana dikatakan oleh Indrayani & Gatningsih (2013 : 65), bahwa pengelolaan perangkat keras yang digunakan di dalam operasionalisasi sistem informasi (hardware) adalah untuk memastikan bahwa sumber-sumber teknis yang penting akan didapatkan ketika diperlukan untuk memberikan pelayanan – pelayanan.

Berdasarkan pandangan tersebut, ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pengembangan Ciamis

Sadata belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Indrayani & Gatningsih (2013 : 65). Dalam hal ini, pemenuhan infrastruktur dapat berpengaruh terhadap kenyamanan pelayanan. Namun, terbatasnya ketersediaan infrastruktur menyebabkan pengembangan Ciamis Sadata belum mencapai harapan.

c. Adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan pengembangan Ciamis Sadata

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa ketersediaan anggaran sudah cukup terpenuhi dalam melaksanakan pengembangan Ciamis Sadata, meskipun dalam penggunaannya, anggaran tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya substansi, dimana Ciamis Sadata merupakan sistem yang dalam penyusunannya diperlukan software yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun dalam hal tersebut, Diskominfo mampu menangani dengan baik dan dapat memanfaatkan anggaran sesuai kebutuhan.

Sebagaimana dikatakan oleh Nurmandi, A. (2020 : 97) bahwa; “prinsip adequate technological infrastructure harus dapat diterapkan. Artinya teknologi informasi yang akan digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, semakin besar anggaran maka semakin canggih teknologinya, sehingga pemerintah harus pintar dalam mempertimbangkan perbandingan price versus performance agar pengeluarannya tidak sia – sia apabila ternyata manfaat yang

diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.”

Berdasarkan pandangan tersebut, ketersediaan anggaran dalam melaksanakan pengembangan Ciamis Sadata sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nurmandi, A. (2020 : 97). Perlu diketahui bahwa teknologi informasi yang digunakan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan, guna meningkatkan kebermanfaatan apabila sistem sudah dapat digunakan oleh publik. Dalam hal ini, diskominfo sudah dapat memanfaatkan anggaran untuk pengembangan Ciamis Sadata sesuai dengan kebutuhan, setiap perubahan pada Ciamis Sadata menunjukkan semakin meningkatnya kualitas dari sistem itu sendiri.

### **3. Value (Nilai & Manfaat)**

a. Adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan pengembangan Ciamis Sadata

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan atas diterapkannya konsep e-government melalui layanan publik Ciamis Sadata sudah maksimal. Hadir nya Ciamis Sadata ialah untuk meningkatkan kualitas pelayanan (e-public) di kabupaten Caimis, juga mendukung kabupaten Ciamis menjadi kota pintar atau (smart city).

Sebagaimana dikatakan oleh Indrajit dalam Nurmandi. A, dkk (2020 : 87) menyatakan bahwa penerapan e-government mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal

mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka Ciamis Sadata sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Indrajit dalam Nurmandi, A, dkk (2020 : 87). Dalam hal ini, Ciamis Sadata merupakan bentuk pengembangan e-government yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan tersebut dalam artian untuk mempermudah akses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat secara elektronik.

b. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan publik Ciamis Sadata.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan publik Ciamis Sadata belum maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Ciamis Sadata belum dilakukan publikasi kepada publik. Adapun dalam mengatasi hal tersebut, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan kerja sama dalam memaksimalkan perencanaan yang telah disusun dalam mewujudkan Ciamis Sadata dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Dalam hal ini, Diskominfo Kabupaten Ciamis masih mengalami hambatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan publik Ciamis Sadata ialah Ciamis Sadata belum sepenuhnya maksimal untuk dapat

dipublikasikan kepada publik, selain itu kurangnya koordinasi dalam penyusunan Ciamis Sadata. Sehingga menyebabkan keterlambatan publikasi dan belum dapat mengukur tingkat partisipasi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah dengan meningkatkan koordinasi dalam penyusunan Ciamis Sadata dan memaksimalkan perencanaan berkaitan dengan publikasi Ciamis Sadata .

Sebagaimana dikatakan oleh Nurmandi, A. dkk (2020 : 86) menyatakan bahwa “salah satu inisiatif e-government adalah dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang luas akan lebih menjamin keputusan yang diambil memenuhi aspirasi masyarakat menuju proses pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis.”

Berdasarkan pandangan tersebut, partisipasi masyarakat dalam mengakses Ciamis Sadata belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nurmandi, A. dkk (2020 : 86). Perlu diketahui bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengukur kebermanfaatannya dari diterapkannya suatu sistem yang disebut sebagai suatu kebijakan. Sehingga, dalam hal ini Ciamis Sadata sangat memerlukan partisipasi masyarakat untuk mendukung proses pengambilan keputusan, apakah layak atau tidak Ciamis Sadata sejauh ini disebut sebagai sistem untuk

memaparkan data – data berkaitan dengan Ciamis Sadata.

c. Adanya kepuasan masyarakat mengenai akses kelengkapan metadata dalam Ciamis Sadata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepuasan masyarakat mengenai akses kelengkapan metadata dalam Ciamis Sadata masih rendah, hal tersebut dapat dibuktikan oleh belummaksimalnya pengembangan Ciamis Sadata dalam kelengkapan metadata, Ciamis Sadata juga belum dilakukan proses publikasi secara maksimal.

Adapun hambatan dalam kepuasan masyarakat mengenai akses kelengkapan metadata dalam Ciamis Sadata, bahwa metadata pada Ciamis Sadata belum lengkap dan masih dalam tahap penyempurnaan, Ciamis Sadata juga belum masuk tahap publikasi kepada publik sehingga belum dapat mengukur kepuasan dari masyarakat sebagai pengakses Ciamis Sadata.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ialah

dengan memaksimalkan perencanaan dalam pengembangan Ciamis Sadata dan menyegerakan proses publikasi Ciamis Sadata.

Sebagaimana dikatakan oleh Nasution (2004 : 104) bahwa “kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima

pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.”

Berdasarkan pandangan tersebut, kepuasan masyarakat dalam mengakses Ciamis Sadata belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nasution (2004 : 104). Perlu diketahui bahwa tingginya kepuasan masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Sehingga, tingginya kepuasan masyarakat dalam mengakses Ciamis Sadata menandakan bahwa pelayanan elektronik yang dilakukan sudah baik dan sesuai harapan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada tiga elemen pengembangan e-government, dapat disimpulkan bahwa Pengembangan E-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal.

Dari keseluruhan hasil observasi dan wawancara yang berdasarkan pada 13 indikator dari 3 dimensi, terdapat 5 indikator yang sudah optimal dan 8 indikator belum optimal seperti kelengkapan metadata pada Ciamis Sadata, rendahnya perencanaan jangka waktu pengerjaan Ciamis Sadata, belum dilakukan sosialisasi Ciamis Sadata secara merata kepada Birokrat dan masyarakat, sosialisasi Ciamis Sadata belum dilakukan secara konsisten mengenai pembaharuan sistem, kurangnya SDM yang



kompeten dalam pengembangan Ciamis Sadata, rendahnya ketersediaan infrastruktur penunjang Ciamis Sadata, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan Ciamis Sadata, serta rendahnya kepuasan masyarakat mengenai akses kelengkapan metadata pada Ciamis Sadata.

Pengembangan e-government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis masih mengalami hambatan – hambatan, diantaranya, kurangnya koordinasi yang terjalin antara OPD sebagai produsen data dengan Diskominfo sebagai walidata dalam hal permintaan data, dimana faktor ego sektoral masih menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan SDI di kabupaten Ciamis. Terbenturnya SDM dalam hal pengetahuan mengenai data dan belum dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, Diskominfo belum mampu mengolah data yang datang per-hari serta kurangnya publikasi mengenai Ciamis Sadata kepada publik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi hambatan – hambatan yaitu dengan melakukan pendekatan dengan para OPD melalui forum atau FGD, diadakannya penyempurnaan validasi dimana setiap harinya akan selalu ada perubahan dan pembaharuan data, dilakukan publikasi secara bertahap mulai dari platform media sosial, diadakannya pelatihan dan pembinaan bagi pegawai sesuai

Bidangnya dalam rangka

meningkatkan kapasitas SDM, memaksimalkan penggunaan infrastruktur seefektif mungkin serta memaksimalkan perencanaan yang telah dibuat dalam mengembangkan Ciamis Sadata.

Walaupun demikian, adanya Ciamis Sadata sebagai bentuk pengembangan e-government di Dinas Komunikasi dan Informatika mampu memberikan manfaat positif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Ciamis Sadata dapat memperbaiki hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat, memudahkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk dapat mengakses data berkaitan dengan kabupaten Ciamis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Falih, Suaedidan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi Dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ilham. (2021). *E-Governance*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Indrajit, R.E. (2019). *E-government Capacity Check*. Yogyakarta : ANDI
- Indrayani, Etin. Gatningsih. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan : Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda*. Bandung :

- IPDN Press Nasution, M.N. 2004. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management).
- Nurmandi, A. Kurniasih, D. Nur, A.K. (2020). Teknologi Informasi Pemerintahan. Yogyakarta : UMY Press.
- Sumaryo, Dkk. (2009). Efektifitas sosialisasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri. Jakarta : CV. Prasasti. Sutaryo. (2020) Dasar-dasar Sosialisasi.
- Tika, M. P. (2006). Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Solo : TB. Rahma.
- Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 10(1), 10-15.
- Nugroho, T. W. A. (2017). Analisis e-government terhadap pelayanan publik di kementerian hukum dan HAM (analysis of e- government to public services in the ministry of law and human rights). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(3), 279-296.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.
- Peraturan Presiden no.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Dan Satu Data Kabupaten Ciamis.